

JURNAL KEBIJAKAN & PELAYANAN PUBLIK

Volume 12, Nomor 1, Februari 2024

P-ISSN: 2339-0999, E-ISSN: 2723-7575

Website: <https://ojs-untikaluwuk.ac.id/index.php/fisip>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA LUWUK KABUPATEN BANGGAI

Herni Djohanis¹, Ni Luh Titi Indayani²

Ilmu Pemerintahan¹, Ilmu Administrasi Negara², Universitas Tompotika Luwuk

Email : hdjohanis@gmail.com, niluhyan48@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dalam konteks perkotaan, permasalahan sampah menjadi isu penting karena meningkatnya jumlah volume timbunan sampah seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Pengelolaan sampah menjadi Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Luwuk Kabupaten Banggai dan untuk mengetahui kendala Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Luwuk Kabupaten Banggai. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan jumlah informan sebanyak 10 orang dengan menggunakan *Snowball Sampling*. Pengambilan data dilakukan dengan cara melalui observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang kemudian dianalisis melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing atau verification*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Luwuk Kabupaten Banggai ini belum sepenuhnya maksimal secara keseluruhan. Hal tersebut didukung oleh fakta di lapangan terkait peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten banggai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga bahwa sudah berjalan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, namun hasilnya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah dan membuang sampah, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung, lemahnya penegakan hukum, serta terkendala anggaran juga yang menjadi faktor penghambat dalam upaya optimalisasi pengelolaan sampah rumah tangga.

Kata kunci: Peran, Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan, Sampah, Rumah Tangga

Abstract

Household waste management is a series of systematic activities that include sorting, collection, transportation, processing, and final processing carried out by the Environmental Agency. In an urban context, waste issues are important because of the increasing volume of waste accumulation in line with population growth and economic activity. Waste management is the objective and purpose of this study, which

is to determine the role of the Environmental Agency in household waste management in Luwuk City, Banggai Regency, and to identify the obstacles faced by the Environmental Agency in household waste management in Luwuk City, Banggai Regency. This research is a descriptive qualitative study with 10 informants using snowball sampling. Data collection was conducted through observation and interviews. The data analysis used in this study was data analysis using the Miles and Huberman model, which was then analyzed through three activity streams, namely data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. The results of the study show that the Environmental Agency in the management of household waste in Luwuk City, Banggai Regency, has not been fully maximized overall. This is supported by facts in the field regarding the role of the Banggai Regency Environmental Agency (DLH) in the implementation of household waste management, which has gone through the stages of planning, organizing, mobilizing, and supervising, but the results are still not optimal. This is due to low community participation in sorting and disposing of waste, limited supporting facilities and infrastructure, weak law enforcement, and budget constraints, which are factors that hinder efforts to optimize household waste management.

Keyword : Role, Environmental Agency, Management, Waste, Household

Pendahuluan

Pengelolaan sampah di Kabupaten Banggai sampai saat ini masih belum mencapai hasil yang optimal khususnya di Kota Luwuk. Persoalan sampah merupakan salah satu permasalahan yang sangat problematik bukan hanya di Kabupaten Banggai, bahkan diseluruh dunia masalah sampah sudah menjadi masalah internasional. Persoalan sampah sangat berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penanggulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah semata akan tetapi penanganannya membutuhkan keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat secara luas(Rismawati & Fatimah, 2023).

Sampah merupakan sisa-sisa aktivitas sehari - hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak memiliki nilai guna dan dibuang ke lingkungan. Sampah mempunyai banyak manfaat untuk manusia dan lingkungan jika dikelola dengan baik, tetapi sampah juga akan berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik serta dapat menimbulkan bencana. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan arus urbanisasi yang pesat dapat menyebabkan jumlah produksi sampah semakin tinggi. Hal ini bukan hanya diakibatkan karena pertumbuhan penduduk tetapi juga karena meningkatnya jumlah timbulan sampah per kapita yang disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Jika sampah tersebut tidak ditangani dan dikelola dengan baik maka dapat mengganggu estetika lingkungan, menimbulkan bau serta dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan seperti gangguan kesehatan dan berkembangnya penyakit (Mirwandi & Mulyono, 2023).

Permasalahan sampah merupakan sebuah tantangan yang akan menentukan sustainability lingkungan suatu daerah (L. Boke et al., 2024). Permasalahan sampah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Peran pemerintah terkait permasalahan

sampah salah satunya dengan mengeluarkan peraturan perundang – undangan tentang sampah dan kebersihan. Pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian pemerintah daerah Kabupaten Banggai mengeluarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah yang menjelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengurangan, dan penanganan sampah.

Peran merupakan aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran terdapat dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat (Yuniarti, 2024).

Secara umum peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier, peran merupakan seperangkap tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya. Peran juga dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (Lano, 2017). Sedangkan menurut Koentrajaraningrat peran berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu. Dengan demikian konsep peran ini merujuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam sebuah organisasi atau sistem.

Menurut Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari - hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut World Health Organization (WHO) sampah merupakan barang yang berasal dari kegiatan manusia yang digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sampah adalah hasil limbah baik yang berasal rumah tangga ataupun industri yang dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan dan keindahan. Serta jenis sampah yang dimaksud dalam undang - undang tersebut adalah sampah organik dan non organik.

Menurut Departemen Kesehatan sampah diartikan sebagai benda padat yang tidak dapat digunakan dan dibuang, yang berasal dari suatu kegiatan dan bersifat padat serta tidak termasuk buangan yang termasuk biologis (human waste). Sedangkan menurut Dermawan, sampah merupakan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh manusia setelah tidak dibutuhkan lagi atau tidak digunakan kembali dalam suatu kegiatan manusia. Segala sesuatu yang dihilangkan dari aktivitas manusia yang tidak terjadi secara alamiah yang disebut sebagai sampah padat. Contoh dari bahan tersebut yaitu produk yang tidak diinginkan, kurang dimanfaatkan, dan tidak digunakan lagi. Sampah menurut Suryani didefinisikan sebagai barang yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk pasar, toko, restoran, tempat tinggal, sekolah, rumah sakit, dan lokasi lainnya, serta merupakan sesuatu yang tersisa setelah suatu prosedur selesai (Waladow et al., 2024).

Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Bupati dalam melaksanakan peraturan daerah dibidang lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di Kabupaten Banggai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 25 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peranan dan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan dekonsentrasi di bidang kebersihan dan lingkungan hidup serta dalam pengelolaan sampah.

Pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganannya dilakukan dengan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Pada teknis pelaksanaan pengelolaan sampah, pemerintah daerah masih memerlukan peraturan lebih lanjut dalam Perda. Oleh karena itu, Perda tentang pengelolaan sampah sebagai pelaksanaan teknis konsepsi pengelolaan sampah berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, perlu ditetapkan oleh masing - masing daerah (Yudiyanto et al., 2019).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu peneliti berusaha menjelaskan atau mendeskripsikan secara terperinci dan mendalam tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Luwuk Kabupaten Banggai. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini dilakukan. Peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai, Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah petugas Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat, dan pihak terkait dalam pengelolaan sampah. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Luwuk Kabupaten Banggai.

Informan adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat (Toding, 2022). Maka dari itu, penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan prosedur *Snowball Sampling*, yaitu penentuan informan yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Syarifah, 2019), informan pada penelitian ini berjumlah 10 orang.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Upaya untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, instrumen utama yang mengambil bagian penting dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*key instrument*), karena peneliti sendiri yang memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data (wawancara dan telaah dokumen), kemudian menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan model Miles dan Huberman (1984) dalam Idrus (Mahmud, 2016) yang mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya menjadi jenuh.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Luwuk Kabupaten Banggai

Secara umum pengelolaan adalah kegiatan merubah sesuatu sehingga menjadi lebih berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga memerlukan keterlibatan peran dalam menjalankan suatu kegiatan. Melalui pendekatan teori George R Terry yang meliputi fungsi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan) dapat melihat peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Luwuk secara sistematis dan menyeluruh.

a. *Planning* (perencanaan)

Tahap perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur, yaitu dimulai dengan rapat internal pada tingkat bidang dan seksi yang dimana masing - masing menyampaikan usulan program maupun kebutuhan lapangan terkait penanganan sampah rumah tangga. Kemudian usulan tersebut dibahas bersama dengan menyesuaikan prioritas dan kondisi nyata di lapangan. Setelah itu, hasil usulan tersebut diusulkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen kegiatan dan kebutuhan anggaran. Apabila anggaran yang diajukan disetujui dan tersedia, maka program yang telah direncanakan akan ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam tahap perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga dimulai dari penyusunan program, penyiapan sarana dan prasarana, sumber daya, serta penetapan target dan tujuan. Perencanaan tersebut melibatkan koordinasi antarbidang dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan anggaran, sehingga diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip kebersihan serta kesehatan lingkungan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Aspek pengorganisasian di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai sudah terstruktur dan berjalan sejak lama. Namun, faktanya kendala utama pada masyarakat yang kurang memahami tentang pemilahan sampah, sehingga Dinas Lingkungan Hidup menjalankan perannya dengan memberikan himbauan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat itu sendiri dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Dalam sistem pengorganisasian juga terdapat kelembagaan yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga.

Dinas Lingkungan Hidup telah berhasil menerbitkan dan membentuk beberapa kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Namun, sebagian kelembagaan sudah tidak aktif lagi dikarenakan terkendala dalam hal pembiayaan atau penganggaran untuk menjalankannya. Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pembagian tugas dan telah membuat jadwal layanan terhadap penanganan sampah setiap wilayah.

c. Actuating (penggerakan)

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Dinas Lingkungan Hidup hanya dapat memberikan kepada petugas organik sedangkan anorganik Dinas Lingkungan Hidup tidak ada dasar hukum untuk memberikan Surat Perintah Tugas, mengingat hubungan kerja mereka hanya sebatas kontrak dengan mekanisme pemberian honorarium. Dengan demikian, Surat Perintah Tugas secara formal hanya diberikan kepada kepala bidang, kepala seksi, dan pejabat fungsional yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja petugas di lapangan. Sementara itu, dari sisi teknis operasional, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengelolaan sampah rumah tangga melalui teknis pengumpulan, pengangkutan hingga pemrosesan akhir yang dilakukan di TPA oleh petugas lapangan.

Untuk tahap penggerakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Luwuk mencakup beberapa hal, yaitu pemberian surat tugas, pelaksanaan teknis operasional dari proses pengangkutan sampai pemrosesan akhir di TPA, penerapan pajak retribusi yang dilakukan setiap bulan oleh pihak DLH, serta peningkatan peran serta masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan setahun sekali di tiga kecamatan dalam Kota Luwuk, sehingga pengelolaan sampah rumah tangga dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.

d. Controlling (pengawasan)

Pengawasan terkait pengelolaan sampah rumah tangga telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai. Dari hasil pemantauan di lapangan masih ditemukan bahwa sampah rumah tangga belum terpilah memang dari sumber berdasarkan jenisnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat masih kurang dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut, pihak Dinas Lingkungan Hidup memberikan himbauan kepada masyarakat agar memahami pentingnya pemilahan sampah yang seharusnya dimulai dari rumah tangga itu sendiri karena semua itu merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya dari pihak dinas.

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Luwuk sudah berjalan sesuai dengan aturan. Adapun untuk tahap perencanaan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Luwuk, Dinas Lingkungan Hidup mulai melakukan penyusunan program, penyiapan sarana dan prasarana, sumber daya, serta penetapan target dan tujuan. Adapun tahap pengorganisasian Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pembagian tugas dan telah membuat jadwal layanan terhadap penanganan sampah setiap wilayah. Dinas Lingkungan Hidup juga telah berhasil menerbitkan dan membentuk beberapa kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Adapun tahap penggerakan Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan beberapa hal, yaitu pemberian surat tugas, pelaksanaan teknis operasional dari proses pengangkutan sampai pemrosesan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), penerapan pajak retribusi yang dilakukan setiap bulan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup, serta peningkatan peran serta masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Serta tahap pengawasan Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi hasil kinerja untuk memastikan kegiatan di lapangan dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengelolaan sampah rumah tangga. Namun,

dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Luwuk masih terdapat kendala-kendala yang menjadi permasalahan selama berlangsungnya proses pengelolaan sampah rumah tangga.

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Luwuk Kab. Banggai

Pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Luwuk belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor – faktor tersebut juga didukung oleh teori Said, yang mengemukakan bahwa keberhasilan suatu proses pengelolaan sampah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu masyarakat, sampah, organisasi, dan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Luwuk. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut :

a. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga sehingga kesadaran dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dan sanksi yang diberikan bagi pelaku membuang sampah sembarangan harus tegas. Meskipun pihak Dinas Lingkungan Hidup menyatakan telah melakukan sosialisasi setiap tahunnya, tetapi dari perspektif masyarakat, kegiatan tersebut belum pernah dilakukan secara langsung kepada masyarakat sehingga mereka beranggapan bahwa tidak ada kegiatan penyuluhan/sosialisasi dari dinas terkait. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan komunikasi, baik dari aspek jangkauan kegiatan, metode pelaksanaan, maupun keterlibatan masyarakat secara nyata.

b. Faktor Sampah

Dalam hal ini, faktor sampah juga mempengaruhi dalam pengelolaan sampah rumah tangga, karena sebagian sampah belum terpisah memang dari sumber sesuai jenisnya. Seperti halnya di lapangan pada saat peneliti melakukan penelitian, terdapat beberapa sampah dari sumber yang masih bercampur jadi satu antara sampah organik dan anorganik, sehingga menghambat proses pengelolaan lebih lanjut dan masih banyak juga sampah yang dibuang sembarangan seperti di pinggir jalan, sungai dan selokan yang dapat menyebabkan bencana salah satunya banjir.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor sampah menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kondisi sampah itu sendiri.

c. Faktor Organisasi

Faktor yang mempengaruhi dalam organisasi yaitu terletak pada perangkapan peran, yang dimana pegawai masih merangkap menjadi regulator sekaligus operator. Sebenarnya, peran regulator harus dipisahkan agar berfokus pada pengaturan dan pengawasan, sedangkan operator berfokus sebagai pelaksana di lapangan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi lainnya yaitu kurangnya organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan karena partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah masih belum terorganisasi dengan baik.

d. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penentu keberhasilan maupun penghambat dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Luwuk. Hal ini dapat dilihat

dengan keterbatasan anggaran dan ketidakmampuan masyarakat membayar retribusi menyebabkan pengelolaan sampah tidak berjalan dengan optimal. Dengan demikian, permasalahan ekonomi masyarakat dan keterbatasan anggaran yang diperlukan dapat menghambat dan memperlambat dalam pencapaian tujuan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Luwuk, sehingga diperlukan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Luwuk Kabupaten Banggai ini belum sepenuhnya maksimal secara keseluruhan. Hal tersebut didukung oleh fakta di lapangan terkait peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga bahwa sudah berjalan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, namun hasilnya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah dan membuang sampah, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung, lemahnya penegakan hukum, serta terkendala anggaran juga yang menjadi faktor penghambat dalam upaya optimalisasi pengelolaan sampah rumah tangga.

Bibliografi

- L. Boke, M., Ma'na, P., & L. Rantererung, C. (2024). Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tana Toraja. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(03), 251–258. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i03.771>
- Mirwandi, O., & Mulyono, D. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Dalam Penanganan Sampah (Studi Upt Wilayah Timur). ... Management, 3(3), 10421056.publisher.org/index.php/home/article/view/187%0Ahttp://bussman.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/187/196
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, 1 (2018).
- Rismawati, N., & Fatimah, N. (2023). PROMOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Nambo Household Waste Management System in Nambo District. 13, 41–46.
- Waladow, A. R., Hukum, F., & Gorontalo, U. N. (2024). Peran Universitas dalam Pengelolaan Sampah Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 4.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 1 (2008).
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, 1 (2018).
- Yudiyanto, Yudhistira, E., & Tania, A. L. (2019). Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan Kota Metro. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat, 6(11), 1–80.
- Yuniarti, D. (2024). Peran Produk Sembako Asal Malaysia Terhadap Masyarakat Perbatasan Indonesia Di Kabupaten Sambas. 6(1), 41.